

SALINAN

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 213 TAHUN 2021

**TENTANG
TIM PENGELOLAAN PENGETAHUAN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka partisipasi aktif dan mendorong pelaksanaan berbagi pengetahuan sebagai bagian dari manajemen pengetahuan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk tim;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Pengelolaan Pengetahuan pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengelolaan Pengetahuan pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
4. Keputusan Presiden Nomor 125/TPA Tahun 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGELOLAAN PENGETAHUAN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelolaan Pengetahuan pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelolaan Pengetahuan pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. Pengarah, mempunyai tugas:
 - 1) memberikan arahan pengelolaan pengetahuan; dan
 - 2) mendorong kelancaran pengelolaan pengetahuan.
- b. Ketua, mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan pengetahuan.
- c. Anggota, mempunyai tugas:
 - 1) menyampaikan pengetahuan yang ada di unit organisasi masing-masing melalui unggah pada aplikasi KMS-PBJ (*Knowledge Management System-Pengadaan Barang/Jasa*) di portal PPSDM (ppsdm.lkpp.go.id);
 - 2) pemutakhiran pengetahuan yang ada di unit organisasi masing-masing; dan
 - 3) menjadi narahubung pengelolaan pengetahuan yang ada di unit organisasi masing-masing.
- d. Penjamin Mutu Pengetahuan (Verifikator), mempunyai tugas:
 - 1) menyusun standar mutu pengetahuan;

- 2) melakukan penjaminan mutu pengetahuan melalui seleksi dan pengujian pengetahuan yang akan diunggah pada KMS-PBJ; dan
 - 3) melakukan klasifikasi, kodefikasi, indeksasi pengetahuan pada KMS-PBJ.
- e. Petugas Teknis, mempunyai tugas:
- 1) membantu unggah pengetahuan pada KMS-PBJ;
 - 2) membantu menyunting tampilan pengetahuan; dan
 - 3) menjadi *helpdesk* terkait persoalan teknis sistem (produsen/user) dan layanan tanya jawab (*FAQ*).
- f. Petugas Administrasi, mempunyai tugas:
- 1) pelaporan pengelolaan pengetahuan pada KMS-PBJ; dan
 - 2) administrasi pengelolaan pengetahuan pada KMS-PBJ.

KETIGA : Tim Pengelolaan Pengetahuan pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala LKPP.

KEEMPAT : Masa jabatan keanggotaan Tim Pengelolaan Pengetahuan pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 2021

Plt. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama;
2. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan;
3. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi;
4. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
5. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah;
6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
7. Inspektur; dan
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/
JASA PEMERINTAH TENTANG TIM
PENGELOLAAN PENGETAHUAN
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 213 TAHUN 2021

TANGGAL : 15 DESEMBER 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN PENGETAHUAN PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Pengarah	1. Sekretaris Utama 2. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan 3. Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi 4. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia 5. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa
2.	Ketua	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
3.	Anggota	1. Andi Darmawan (Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum) 2. Rinatri Rahmayanti (Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus)

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
		<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="834 381 1433 600">3. Rahmat Fitriadi Herman (Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional)<li data-bbox="834 600 1433 767">4. M. Yusuf Chandra N. (Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan)<li data-bbox="834 767 1433 874">5. Afri Dian Setiyani (Direktorat Pengembangan Sistem Katalog)<li data-bbox="834 874 1433 1098">6. Alina Mahardhika Puspa (Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik)<li data-bbox="834 1098 1433 1265">7. Kemala De Kristie (Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan)<li data-bbox="834 1265 1433 1373">8. Umi Nurnaeni (Direktorat Sertifikasi Profesi)<li data-bbox="834 1373 1433 1547">9. Nida Mufidah Angraini (Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat)<li data-bbox="834 1547 1433 1654">10. Agung Ismail (Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah)<li data-bbox="834 1654 1433 1821">11. Sigit Apriyanto (Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum)<li data-bbox="834 1821 1433 1928">12. Cecep Hendar Supriadi (Biro Perencanaan dan Keuangan)<li data-bbox="834 1928 1433 2120">13. Nungky Karina Putri (Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia)

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
		14. Meisiska (Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia) 15. Rini Handriyani (Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum) 16. Rinaldy Prihandoko (Inspektorat) 17. Budi Bowo Laksono (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa)
4.	Penjamin Mutu Pengetahuan (Verifikator)	1. Tatang Rustandar Wiraatmadja 2. Arif Rachman 3. Hestri Rokayah 4. Vina Da'watul Aropah 5. Tri Susanto 6. Rakhma Kusuma Wardhani 7. Rizky Arimawati 8. Budi Bowo Laksono 9. Yosi Febriani
5.	Petugas Teknis	1. Yoga Nurdani 2. Lutfi Ramadhan
6.	Petugas Administrasi	1. Ahmad Fauzi 2. Erlyn Halimatusyadiah 3. Didin Rusyad Nurdin 4. Fatmawati

Plt. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA